**Jurnal Administrasi Publik :
Public Administration Journal**

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

**Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin
di Sumatera Utara**

***Strategy and Model of Empowerment of Poor Communities
in North Sumatera***

Yanhar Jamaluddin^{1*)}, Fitriani¹⁾, Safrida²⁾, Warjio³⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

²⁾ Program Studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

³⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara,
Indonesia.

Diterima: Maret 2018; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019

**Corresponding Email: yanharja-ii@uisu.ac.id*

Abstrak

Artikel ini disusun dilatarbelakangi dimana masyarakat miskin di Sumatera Utara tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan menempatkan kedudukan dan perannya dalam pemerintahan dan pembangunan, sementara upaya memberdayakan masyarakat miskin belum optimal dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Artikel ini disusun bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab tidak berdayanya masyarakat miskin di Sumatera Utara, dan menguraikan strategi dan model memberdayakan masyarakat miskin di Sumatera Utara. Masyarakat miskin tidak berdaya dan posisinya lemah disebabkan faktor Kemiskinan, Kelemahan fisik (Jasmani), Isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan, Masyarakat miskin tidak dikelola dan cenderung dibiarkan oleh Pemerintah, dan tidak adanya kepercayaan kepada masyarakat miskin. Strategi pemberdayaan masyarakat miskin di Sumatera Utara dapat dilakukan adalah melalui program Penguatan Kebutuhan, Penguatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Institusi, Penguatan Akses Komunikasi dan Informasi, Penguatan Jaringan - Kemitraan, dan Penguatan Partisipasi. Sedangkan model Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang efektif dilaksanakan di Sumatera Utara adalah *Advantage and Change Model (ACM)*

Kata Kunci: Strategi, Model, Pemberdayaan, Masyarakat Miskin

Abstract

This article was prepared on the background where the poor in North Sumatera are powerless and have no ability to place their position and role in government and development, while efforts to empower the poor have not been optimally carried out by the North Sumatera Provincial government. This article was prepared to discuss ways to make the poor in North Sumatera powerless, and outline strategies and models to empower the poor in North Sumatera. The poor are powerless and the risk poses a factor of poverty, physical weakness, isolation, improvement, and powerlessness, the poor are not managed and tend to be left by the government, and are not liked by the community. The strategy for empowering the poor in North Sumatera can be carried out through the Need for Strengthening program, Strengthening Human Resources, Strengthening Institutions, Strengthening Access to Communication and Information, Strengthening Networks - Partnerships, and Strengthening Participation. While the effective model of Poor Community Empowerment in North Sumatera is an Advantage and Change Model (ACM)

Keywords: Strategy, Model, Empowerment, The Poor.

How to Cite: Jamaluddin, Y. Fitriani. Safrida & Warjio. (2019). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*. 9 (1): 21 - 30

PENDAHULUAN

Salah satu konsep pembangunan nasional Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 disebutkan bahwa misi pembangunan sumberdaya manusia adalah “Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera”. Ini berarti, kedudukan sumberdaya manusia merupakan sasaran yang sangat penting sebagai indikator keberhasilan pembangunan nasional. Jika potensi dan kemampuan manusia telah diketahui, maka akan memberi pengaruh terhadap bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu patut diperhatikan perlunya program yang sistematis dan strategis untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan nasional dibidang sumberdaya manusia, yaitu dengan menekan angka kemiskinan (*baseline* 2014) sebesar 10,96 % menjadi (sasaran) 7,0-8,0 % pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019, 2014).

Salah satu program pengembangan kualitas hidup manusia adalah dengan memberdayakan potensi dan kemampuan masyarakat secara produktif dan terintegratif melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. (Parson 2004, dalam Mardikanto, 2014). Artinya, Pemberdayaan dimaknai sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi masyarakat di seluruh lapisan terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Sedangkan Mardikanto (2014), Pemberdayaan bertujuan dua arah; *Pertama*, melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan - *Kedua*, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan (Mardikanto, 2014).

Pandangan-pandangan ini menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses memfasilitasi masyarakat miskin secara struktural agar mereka dapat mengidentifikasi harapan, mengumpulkan sumberdaya, dan membantu menyusun kembali kekuatan mereka dalam suatu komunitas.

Dalam menggerakkan program pengembangan kualitas hidup manusia, masalah kemiskinan merupakan tantangan yang sangat besar. Kemiskinan adalah masalah utama pembangunan ekonomi, karena itu pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi kemiskinan. Karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensi (Sukidjo, 2005). Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah, bertujuan untuk memberantas kemiskinan di berbagai daerah di seluruh negeri. Namun, setiap program tidak sepenuhnya mampu memberikan harapan sempurna untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Model pemberdayaan masyarakat yang diberikan tidak mendidik orang untuk menjadi kreatif. Sebagian besar program memiliki lebih banyak amal, dalam bentuk pinjaman untuk menyediakan modal, dan lain-lain. (Putra, 2007).

Seperti di Sumatera Utara, persentase penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 9,28 % atau 1.326,6 juta, sedangkan tahun 2016 sebesar 10,27 % atau 1.452,6 juta (BPS. Provsu, 2018). Walaupun data tersebut menunjukkan terjadinya penurunan, namun kenyataannya persentase penduduk miskin terpusat di kawasan dataran tinggi dan pantai barat (Musrenbang Provsu, 2018). Pada sisi lain, upaya memberdayakan masyarakat miskin belumlah optimal dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dapat diukur dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) sebesar 1,71 % dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty*

Severity Index) sebesar 0,44 % (BPS.Provsu, 2018)

Fakta lainnya; Masyarakat miskin mendapatkan lebih sedikit manfaat dari program-program pemberdayaan dan pelayanan publik dibandingkan anggota masyarakat lainnya, Masyarakat miskin sulit memperoleh kepercayaan untuk turut berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, dan Masyarakat miskin sulit untuk mengaktualisasikan peran dan posisinya. Akibatnya; Masyarakat miskin diposisikan sebagai kelompok yang tidak diperhitungkan bahkan terpinggirkan; Masyarakat miskin sulit (tidak) mendapatkan kepercayaan; Masyarakat miskin tertinggal dalam memperoleh fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan Masyarakat miskin semakin terbelakang dan lemah secara personal dan struktural.

Berdasarkan data, fakta dan akibat tersebut, maka persoalan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ini erat kaitan dengan sebuah hasil penelitian. Seperti penelitian Hatu, Rauf, A (2008), menyatakan bahwa kemiskinan sesungguhnya merupakan sebuah persoalan struktural dan multidimensi yang sangat pelik, mencakup di dalamnya masalah yang berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, aset, psikologi dan lain-lain dalam dimensi kehidupan manusia, sehingga secara umum masyarakat miskin berada dalam situasi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi pada suatu kesempatan. Situasi tersebut menyebabkan mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya secara layak, terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah pedesaan.

Bertitik tolak dari fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa masyarakat miskin tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan menempatkan kedudukan (posisi) dan perannya dalam pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara. Oleh sebab itu

penulis menganggap masalah ini penting untuk dianalisis secara mendalam, karena permasalahan ini menunjukkan adanya penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi (Sugiyono, 2014). Permasalahan ini pun cukup signifikan mempengaruhi terwujudnya manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera di Sumatera Utara, apalagi pada tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi kisaran 8,5 – 9 persen (<http://harian.analisadaily.com/kota/news/sumut-lahirkan-lima-kesepakatan-pembangunan> 2019/541014/2018/04/19)

PEMBAHASAN

Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*; berarti kekuatan. Konsep pemberdayaan pada dasarnya merupakan *antithesis* terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Menurut Kamus webster dalam *Oxford English Dictionary*, kata “*Empower*” mengandung 2 arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to* (diartikan sebagai memberi kekuasaan – mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain), Pengertian kedua berarti *to give ability to or enable* (diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan) (Sedarmayanti, 2000). Selanjutnya Bennis & Mische (1995), Pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokratis yang mengkotakkan orang dan membuat mereka menggunakan seefektif mungkin ketrampilan, pengalaman, energi dan ambisinya (Sedarmayanti, 2000). Sedangkan Anthony Bebbington (2000), *empowerment is a process through which those excluded are able to participate more fully in decisions about form of growth,*

strategies of development, and distribution of their product. (Mardikanto, 2014). Dengan demikian pemberdayaan merupakan konsep dari strategi pembangunan yang mencerminkan suatu cara pandang pembangunan yang bersifat *"People Centered, Participatory, empowering, and sustainable.*

Karena orientasi pemberdayaan adalah pada individu dan masyarakat, maka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki (Sumodiningrat, 1999 dalam Mardikanto (2014). Dari sudut aktivitasnya maka pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua pihak yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Oleh karenanya pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide dan gagasan-gagasannya serta kemampuan dan keberanian untuk memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. (Mardikanto, 2014).

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka tepatlah seperti diungkapkan Mardikanto (2014), bahwa Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Atau dengan kata lain pemberdayaan masyarakat bertujuan membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang

terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan (Payne dan Shaddlow 2002, dalam Soleh, 2014). Selaras dengan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari pemberdayaan bagi masyarakat adalah: a) Untuk meningkatkan harkat – martabat manusia; b) Untuk melepaskan diri dari keterbelakangan/ketertinggalan dalam struktur sosial, aktivitas sosial dan pembangunan; c) Untuk memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Faktor Penyebab Ketidakberdayaan Masyarakat Miskin

Chambers (1987) pernah mengungkapkan; Ketidakberdayaan adalah orang yang tidak berdaya, seringkali terbatas dan tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah dan terhalang memperoleh bantuan hukum, serta membatasi kemampuannya untuk menuntut upah yang layak, menempatkan dirinya selalu pada pihak yang dirugikan, dan hampir tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap pemerintah dalam mengambil keputusan tentang pelayanan dan bantuan yang perlu diberikan kepada mereka sendiri. Pandangan ini sangat identik dengan hasil suatu penelitian yang mengungkapkan, bahwa aksesibilitas yang buruk ke layanan kesehatan yang dilakukan melalui beberapa program kesehatan adalah Jamkesmas dan Jamkesmaskot. Kurangnya informasi tentang program karena kurangnya sosialisasi pemerintah (Restiyani, Puji, Astrika, Lusia, 2013). Itu artinya, masyarakat menjadi terbelakang karena kurang mendapatkan informasi sehingga berdampak pada minimnya memperoleh akses pelayanan dan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut, maka ketidakberdayaan dapat diukur secara

kualitatif sebagai kelompok yang tidak diperhitungkan, kurang beruntung, Lemah, tidak memiliki pendapatan dan asset, lemah jasmani, tersisih dari arus kehidupan, rentan (tidak punya modal menghadapi kebutuhan yang spontan), tidak berdaya dan terbelakang. Oleh karena itu ketidakberdayaan identik dengan kemiskinan, ditandai dengan: 1) kedudukan mereka yang rendah; 2) jauh dari jangkauan komunikasi dan menerima informasi; 3) tidak punya asset dan tempat tinggal tetap (jika pun ada, tempat tinggal yang tidak layak); 4) kehidupan yang tidak terjamin; 5) menghadapi kesusahan dengan apa adanya; 6) tidak sehat dan jauh dari layanan pemerintah; 7) sebagai kelompok yang lemah, tertekan oleh kelompok yang kaya (elit); 8) dan menjadi kelompok yang selalu dirugikan.

Jika makna ketidakberdayaan masyarakat miskin di Sumatera Utara dianalisis secara mendalam berdasarkan delapan parameter di atas, maka ketidakberdayaan yang identik dengan kemiskinan itu terjadi disebabkan karena: a) Miskin; yaitu tidak memiliki uang dan tidak punya pendapatan, mengakibatkan orang menjadi miskin ditandai dengan: 1) Kekurangan makan, kekurangan gizi, daya tahan tubuh rendah sehingga fisik/jasmani menjadi lemah; 2) Tidak bisa membiayai pendidikan; 3) Tidak berdaya; 4) Kehilangan kesejahteraan, seperti pemulung, trafiking, gelandangan, anak terlantar, dan korban tindak kekerasan; 5) Kedudukan menjadi rendah; 6) Tidak mempunyai suara. b) Kelemahan fisik (Jasmani), mengakibatkan produktivitas rendah, upah rendah dan rentan sakit sehingga terbatasnya kemampuan. c) Keterasingan/Isolasi, karena tidak berpendidikan dan diluar jangkauan komunikasi sehingga pelayanan dan bantuan (sarana) pemerintah tidak sampai menjangkau mereka, dan menjauhkan mereka dari informasi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi; d) Kerentanan/kerawanan, situasi sulit

dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga orang miskin terpaksa harus menukar atau menjual barang yang ada atau dengan meminjam kepada orang lain, dan tidak memiliki ketergantungan dengan orang-orang yang dapat dijadikan gantungan hidupnya. e) Ketidakberdayaan Ketidakberdayaan masyarakat miskin dicerminkan dengan kemudahan golongan masyarakat lainnya yang lebih mampu dan lebih kuat untuk menjaring, mengatur, dan membelokkan manfaat atau hasil-hasil pembangunan serta pelayanan pemerintah yang diperuntukkan bagi mereka yang kekurangan, karena berada dalam kedudukan yang lemah.

Faktor-faktor tersebut di atas dalam kenyataannya tidak berdiri sendiri namun bertautan dan berhubungan satu sama lain seperti sebuah siklus. Chambers menyebutkan faktor-faktor tersebut disebut dengan perangkat kemiskinan.

Selain kemiskinan yang menjadi penyebab ketidakberdayaan masyarakat miskin, faktor penyebab lainnya antara lain: Masyarakat miskin tidak dikelola dan cenderung dibiarkan oleh negara, dan masyarakat miskin lemah secara personal dan struktural. Dari sudut pandang program pun cenderung kurang menyentuh masyarakat miskin. Seperti program pengurangan kemiskinan tidak dapat hanya diberikan bantuan ekonomi melainkan perlu dilakukan pemberdayaan berupa pendidikan kewirausahaan, untuk membentuk sikap mental yang mandiri, pantang menyerah, kreatif serta mengembangkan *need for achievement*, sehingga potensi yang dimiliki maupun fasilitas yang diperoleh dapat dikembangkan (Sukidjo, 2012). Atau melalui program pengembangan *social entrepreneurship* yaitu mengembangkan sosial *entrepreneur* dengan cara mengubah perilaku dan pemahaman atau kesadaran orang-orang di sekitarnya (Rusli, Zaili, Sahuri, Chalid, Mashur, Dadang, 2011).

Strategi Pemberdayaan

Bagi masyarakat miskin keinginan untuk menjadi lebih baik merupakan suatu harapan. Oleh karenanya tidak jarang mereka berusaha sendiri untuk dapat kuat dan berdaya serta menjadi kelompok yang diperhitungkan. Harapan ini ada benarnya sejalan dengan pertanyaan “Siapa yang harus memulai menanggulangi nasib orang miskin”; Pendapat pertama: Rakyat miskin sendirilah yang harus menolong dirinya. Pendapat kedua: Prakarsa, untuk membantu mereka agar mampu menolong diri mereka sendiri, terletak ditangan “orang luar” yang memiliki kekuatan. Orang luar adalah yang bukan orang miskin. Walaupun antara pendapat pertama dan kedua saling bertolak belakang, namun tetap perlu dicermati; Bagaimana mendorong masyarakat miskin yang tidak berdaya dan lemah, naik peringkat menjadi kelompok masyarakat yang punya kekuatan dan berpengaruh?

Menurut orang miskin untuk bisa KUAT dan BERDAYA maka: 1) lebih dulu mengatasi kemiskinan, artinya dengan mengatasi masalah Pangan; 2) selanjutnya mengatasi kelemahan fisik, artinya dengan mengatasi masalah kesehatan; 3) isolasi, artinya dengan mensuplai Skill, bantuan sarana, dan akses; 4) kerentanan, artinya dengan memberikan perlindungan dan Advokasi; 5) dan terakhir ketidakberdayaan, artinya dengan menciptakan *network* – kemitraan.

Dari uraian di atas, maka upaya 1, 2, 3 pada akhirnya akan mengarah pada target memperoleh sumber pendapatan, sedangkan upaya 4, 5 pada akhirnya akan mengarah pada target memperoleh kekuatan/keberdayaan.

Dengan demikian strategi pemberdayaan yang sistematis yang dapat (harus) dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah melalui Penguatan Kebutuhan, Penguatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Institusi, Penguatan Akses Komunikasi dan Informasi,

Penguatan Jaringan – Kemitraan, dan Penguatan Partisipasi.

Penguatan Kebutuhan hidup, dapat diwujudkan melalui program: 1) Penguatan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki dan hak asasi bagi setiap individu. Oleh karena itu terpenuhinya kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Melalui penguatan pangan ke semua lapisan masyarakat tanpa kecuali berarti menghindari akan terjadi kemiskinan, karena Kemiskinan adalah aspek utama sebagai penyebab terjadinya kelaparan.

Kemiskinan menyebabkan daya beli terhadap bahan makanan rendah sehingga status kecukupan gizi masyarakat tidak terpenuhi (http://www.academia.edu/29817837/Penguatan_Pangan_Keluarga_Demi_Kesejahteraan_Hidup_Bersama).

Kemudahan untuk memperoleh layanan dan fasilitas pengobatan. Menurut data Badan Pusat Statistik - 2018, Banyaknya sarana Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sejenisnya (2017) di Sumatera Utara berjumlah 26.145 sarana, terdiri dari Puskesmas, Balai Pengobatan Umum, Poskesdes, dan Posyandu. Namun kemudahan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkannya masih minim disebabkan kurangnya informasi tentang program. Untuk itu harus diprioritaskan kegiatan sosialisasi pemerintah.

Memberikan perlindungan akan rasa aman melalui advokasi. Zastrow (1982) mengatakan advokasi sebagai aktivitas memberikan pertolongan terhadap klien untuk mencapai layanan (service) yang mereka telah ditolak sebelumnya dan memberikan ekspansi terhadap layanan tersebut agar banyak orang yang terwadahi. (<https://www.terketik.com/2017/03/pengertian-advokasi-jenis-dan-fungsinya.html>).

Program Padat karya, bantuan sarana dan Penyetaraan modal kecil, supaya masyarakat miskin punya pendapatan dan bisa produktif. Salah satu upaya mewujudkan program ini adalah dengan mengembangkan UMKM yang memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%. Upaya untuk memajukan dan mengembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja yang ada dan tentu saja akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang terlibat di dalamnya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Dan pada akhirnya akan dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan (Supriyanto, 2006). Program seperti ini sangat mungkin dilakukan untuk mendorong Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2015 – 2017 cenderung meningkat. Seperti pada tabel berikut:

Tabel 1: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Sumatera Utara 2015-2017.

TPAK		TPT	
2015	2017	2015	2017
67,28	68,88	6,71	5,60

Sumber : BPS Prov.SU, 2018

Penguatan SDM, penguatan ini dapat diwujudkan melalui program: 1) Pengembangan ketrampilan, pengetahuan dan sikap yang diarahkan terwujudkan produktivitas individu dan masyarakat yang produktif, dan pada akhirnya individu dan masyarakat aktif menjalankan usaha-usaha produktif; 2) Perbaikan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi. Kemampuan ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim kerjasama yang sehat atau kondusif dalam kelompok maupun dengan kelompok/pihak lain. Pencapaian kondisi ini tentunya akan membantu

masyarakat miskin lebih lancar dan solid dalam beraktivitas. 3) Menumbuhkan motivasi masyarakat miskin untuk: merubah cara pandang, cara berpikir, dan berperilaku; sadar akan peran dan HAK-HAK mereka dalam pembangunan; berani dalam menggunakan HAK-HAK bahwa mereka adalah bagian yang turut berpengaruh dalam proses pembangunan

Penguatan Institusi, penguatan ini dapat diwujudkan melalui program: 1) Memberikan Desentralisasi dan pendelegasian peran serta Kepercayaan untuk mengelola Hak dan peran; 2) Membentuk komunitas (*community*) sebagai wadah untuk mengorganisir kekuatan. *Community* berarti kelompok sosial yang terbatas, yang memperlihatkan rasa sentiment yang sama. Menurut Chambers (1987), Komunitas dibentuk atas dasar: 1) Satu perasaan yang sama (*community sentiment*), bahwa kita adalah satu. Satu sikap dan satu dalam perbuatan sehingga menjadi satu kesatuan; 2) Satu pemahaman, bahwa mereka sama-sama punya peran dan sama-sama mengambil peran; 3) Saling ketergantungan baik secara fisik maupun Psychologis; 4) Solidaritas yang sama.

Pendampingan masyarakat miskin. Kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat miskin terkawal secara efektif. Para pendamping pun ditugaskan mengajarkan hal-hal teknis (sebagaimana penguatan sumber daya) dan turut serta memberdayakan masyarakat miskin menjadi maju, kuat, dan mandiri.

Pendampingan adalah berasal dari pihak luar yang berfungsi sebagai mitra masyarakat miskin untuk bisa bangkit. Dalam pelaksanaannya pendampingan ini dapat disinergikan dengan Program INKUBASI, yaitu program pembinaan yang bersinergi antara masyarakat miskin dengan Pihak Luar yang PEDULI dan menaruh perhatian. Tujuan yang diharapkan dalam program ini adalah untuk menaikkan performa masyarakat miskin. Namun, masalahnya, dalam kondisi

struktural yang timpang masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan “intervensi” dari luar. Hadirnya pihak luar (pemerintah, NGO, organisasi masyarakat sipil, organisasi agama, perguruan tinggi, dan lain-lain) ke komunitas bukanlah mendikte, menggurui, atau menentukan, melainkan bertindak sebagai fasilitator - katalisator yang memudahkan, menggerakkan, mengorganisir, menghubungkan, memberi uang, mendorong, membangkitkan dan seterusnya. Hubungan antara komunitas dengan pihak luar itu bersifat setara, saling percaya, saling menghormati, terbuka, serta saling belajar untuk tumbuh berkembang secara bersama-sama. Program yang juga dapat dilakukan seperti yang pernah berhasil dilakukan di Kabupaten Manokwari adalah melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan (Saroy & Tony, 2013)

Penguatan Akses komunikasi dan Informasi, penguatan ini dapat diwujudkan melalui program: 1) Membuka ruang komunikasi partisipatif yang seluas-luasnya untuk memudahkan masyarakat miskin lebih banyak mendengarkan (memperoleh informasi); 2) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk bertanya dan menyuarakan ide/gagasan tentang masalah kehidupan.

Penguatan Network - Kemitraan, penguatan ini dapat diwujudkan melalui program konektivitas kelompok masyarakat miskin dengan kelompok-kelompok jaringan yang ada dan terbentuknya kemitraan untuk berhubungan dengan pihak lain yang sama-sama berkepentingan dan/atau turut bersama-sama menyuarakan tuntutan/pengaruh.

Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumberdaya di dalam masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial.

Untuk menjamin agar strategi pemberdayaan tersebut dapat berhasil maka harus diperhatikan beberapa aspek, antara lain kemauan - motivasi - kematangan - kemampuan - dan Kepercayaan dari masing-masing pihak: yaitu masyarakat miskin sebagai pihak yang DIBERDAYAKAN dengan “Pihak Luar” yang MEMBERDAYAKAN. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan output “Masyarakat Miskin yang Maju, Kuat, Berdaya, dan Mandiri“, sehingga masyarakat miskin di Sumatera Utara dapat sejajar dan berkurangnya kesenjangan peran dengan masyarakat elit/kaya.

Model pemberdayaan yang efektif

Secara aplikatif penerapan suatu model mengacu pada dua sifat yaitu Konstruktif atau Destruktif. Konstruktif yaitu: penerapan suatu model yang bersifat ekstrem, yang dilakukan dengan menyesuaikan keadaan yang diperlukan, sedangkan Destruktif yaitu: penerapan suatu model pemberdayaan yang bersifat apatis, selalu lamban atau menentang sama sekali akan adanya penguatan, kebiasaan yang sudah ada dianggap cocok dan tidak perlu adanya penguatan. Jika proses pemberdayaan dilihat dari segi manfaat dan hasil akhir yang dicapai yaitu terciptanya “Masyarakat Miskin yang Maju,

Kuat, Berdaya, dan Mandiri“ maka pemberdayaan dapat dilakukan secara Konstruktif, sedangkan Model pemberdayaannya saya sebut dengan *Advantage and Change Model (ACM)*, yaitu suatu model pemberdayaan yang memberi faedah (bukan mudharat) bagi pemerintah dan menghasilkan perubahan atau perbaikan bagi masyarakat miskin.

Faedah bagi Pemerintah, antara lain:

a) Berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran aktif; b) Meningkatnya jumlah angka partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; c) Munculnya agent-agent mikro ekonomi baru di masyarakat (*Informal Sector*); d) Menekan migrasi masyarakat ke kota, sehingga kota tidak lagi dijadikan pilihan utama untuk memperoleh pendapatan; e) Posisi masyarakat miskin perlahan berubah menjadi kelompok yang turut diperhitungkan; f) Adanya keyakinan masyarakat miskin akan memperoleh kepercayaan; g) Masyarakat miskin turut memperoleh fasilitas umum (Fasum) – fasilitas sosial (Fasos); h) Masyarakat miskin bangkit dari keterbelakangan dan lebih berdaya secara personal dan structural; i) Masyarakat miskin menjadi mandiri dan bebas (tidak tertekan) oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk kepentingan politik-ekonomi

SIMPULAN

Masyarakat miskin tidak berdaya dan posisinya lemah disebabkan faktor Kemiskinan, Kelemahan fisik (Jasmani), Isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan, Masyarakat miskin tidak dikelola dan cenderung dibiarkan oleh negara, dan tidak adanya kepercayaan kepada masyarakat miskin. Strategi pemberdayaan masyarakat miskin melalui Penguatan Kebutuhan, Penguatan Sumberdaya Manusia, Penguatan Institusi, Penguatan Akses Komunikasi dan Informasi, Penguatan Jaringan – Kemitraan, dan Penguatan Partisipasi. Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang

efektif dilaksanakan adalah *Advantage and Change Model (ACM)*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, (2018). Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka
- Bappeda Prov. Sumatera Utara, (2018). Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Sumatera Utara.
- Bouman, P.J. (1976). *Sosiologi; Pengertian-Pengertian dan Masalah-masalah – cetakan 13*, Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius,
- Bouman, P.J. (1976). *Ilmu Masyarakat Umum, Pengantar Sosiologi – cetakan 15*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa - terjemahan dari Rural Development* oleh Pepep Sudrajat – pengantar M. Dawam Raharjo, LP3ES, Jakarta.
- Hatu, R.A. (2008). “Upaya Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan”, *Jurnal Inovasi*, Vol. 05, No. 04
- [http://harian.analisadaily.com/kota/news/sumut-lahirkan-lima-kesepakatan-pembangunan-2019/541014/2018/04/19>\[12/12/2018\]](http://harian.analisadaily.com/kota/news/sumut-lahirkan-lima-kesepakatan-pembangunan-2019/541014/2018/04/19>[12/12/2018])
- [http://www.academia.edu/29817837/Penguatan_Pangan_Keluarga_Demi_Kesejahteraan_Hidup_Bersama>\[02/05/2019\]](http://www.academia.edu/29817837/Penguatan_Pangan_Keluarga_Demi_Kesejahteraan_Hidup_Bersama>[02/05/2019])
- <https://www.terketik.com/2017/03/pengertian-advokasi-jenis-dan-fungsinya.html>>[02/05/2019]
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
- Lysen. A. (1976). *Individu dan Masyarakat – cetakan 8*, Bandung: Penerbit Sumur.
- Mansyur, C. (1983). *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya
- Putra, R.E. (2007). “Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia”, Universitas Andalas, *Jurnal Demokrasi*, Vol 6, No 1.
- Restiyani, P. Fitriyah, Astrika, Lusua, (2013), “Aksesibilitas Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Kawasan Kampung Tambak Mulyo Kelurahan Tanjung Mas Semarang)”, *Journal of Politic and Government Studies*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2013,
- Rusli, Z. Sahuri, C. Mashur, D. (2012). “Penerapan Social Entrepreneurship dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Perkotaan”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol 2, No 2
- Saroy, T. (2013), “Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin”, *Jurnal Governance*, Vol 5, No 1.

- Sedarmayanti. (2000). *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Soleh, C. (2014). *Dialektika Pembangunan Dengan Pemberdayaan*, Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sukidjo. (2005). "P2KP Sebagai Sarana Pemberdayaan untuk Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, FE-UNY*, Vol 2, No 1.
- Sukidjo. (2012), "Peran Pendidikan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Vol 8, No 1
- Supriyanto. (2006). "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan" *Jurnal Ekonomi & Pendidikan, FE-UNY*, Vol 3, No 1.
- Tjokroamidjojo, B. (1987). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.